
Daftar Isi

Tata Cara Mengemas Produk Pariwisata pada Daerah Tujuan Wisata

Edwin Fiatiano

165-174

Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian

Model Grameen Bank di Indonesia

Sulikah Asmorowati

175-190

***Community Based Tourism (CBT)* sebagai Pendekatan**

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Sri Endah Nurhidayati

191-202

Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis

Mochtar Lutfi

203-207

Status Wanita dalam Perspektif Kajian Studi Kependudukan

I.B. Wirawan

208-219

Praktik Diskursif *The Theory of Truth* Michel Foucault

dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa di Indonesia

Moch. Jalal

220-227

Petani Garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam

di Rembang, Jawa Tengah

Yety Rochwulaningsih

228-239

Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat

Afrizal

240-256

Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia

Sulikah Asmorowati

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

This paper aims to describe the impacts of a micro-credit program targeted women as its beneficiaries. This topic is increasingly significant after Muhammad Yunus with his Grameen Bank in Bangladesh won the Nobel Prize in 2005 and followed by desires of adopting Grameen Bank model in Indonesia. It focuses on whether the impacts lead to empowerment or in contrast impedes women as beneficiaries, and thus strengthen the triple burden of women, in which women have responsibilities for reproduction, production and social functions in the community. With the extensive study of literature, this paper argues that a micro-credit program may lead to empowerment but at the same time can bring impediments for women.

Key words: *micro credit, empowerment, burden, woman.*

Hadiah Nobel perdamaian bagi Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya di Bangladesh, memberikan pelajaran akan pentingnya institusi keuangan mikro bagi kaum miskin, khususnya di kalangan kaum perempuan. Hal penting lain yang dapat kita ketahui adalah bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga dan lebih lanjut mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Hal ini mengingat bahwa 97% dari total 6,61 juta nasabah Grameen Bank adalah perempuan. Program kredit mikro, yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum miskin, telah dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat selama ini masyarakat miskin mendapat

banyak halangan untuk mengakses sistem atau lembaga perbankan lainnya.

Di tingkat internasional selain pencanangan tahun 2005 sebagai tahun kredit mikro, pada 19-22 April 2005 diselenggarakan pertemuan puncak kredit mikro di Santiago, Chile dengan agenda bagaimana membuat setidaknya 100 juta penduduk miskin di dunia bisa mempunyai akses terhadap kredit mikro. Bank-bank besar internasional, seperti Standart Chartered Bank, Citibank, termasuk juga bank-bank terkemuka di Indonesia, mengikuti pendahulunya Bank Rakyat Indonesia, juga telah membentuk unit-unit yang mengkhususkan diri untuk kredit mikro (Kompas 15 Maret 2005). Yang menarik, dalam tahun-tahun terakhir ini, di

kalangan negara dunia ketiga, dipelopori pula oleh lembaga internasional dunia (seperti PBB dan Bank Dunia), telah menekankan pentingnya kredit mikro untuk mengatasi kemiskinan di kalangan perempuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para perempuan miskin yang selama ini cenderung terabaikan (Pearson, 1992; Moser, 1992). Contoh paling nyata adalah keberhasilan Muhammad Yunus, di Banglades dengan Grammen Bank, India dengan SEWA (sepertiga total kredit mikro di dunia diterima kelompok sasaran perempuan di India (Elavia, 1994 dalam Panjaitan et al., 1999), termasuk pula di Indonesia.

Di Indonesia, komitmen ini terlihat dengan diselenggarakannya program kredit mikro yang dikelola Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK, dulu YASPPUK), yaitu lembaga jaringan beranggotakan 54 LSM dan 22 partisipan di 22 propinsi di Indonesia. ASPPUK dalam program kredit mikronya melakukan kegiatan *revolving fund* yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan melalui usaha produktifnya (Firdaus & Hartini 2001: 42; Dewayanti & Chotim 2004). Dalam kerangka *women in development* (perempuan dalam pembangunan) kemudian berkembang menjadi *gender and development* (Pearson, 1992; Young, 1993; Moser, 1992), lebih banyak program kredit mikro ditujukan bagi para perempuan, khususnya yang berstrata ekonomi rendah. Dengan argumen untuk keadilan dan efisiensi, kredit mikro untuk perempuan telah mengurangi hambatan bagi perempuan, khususnya kelompok miskin mengakses keuangan dunia, perempuan yang tersingkir dari lembaga keuangan formal yang selama ini lebih banyak dinikmati para lelaki atau kalangan masyarakat yang lebih mampu (UNDP,

1995 dalam Hunt, 2001). Yang terpenting saat ini adalah program-program pemberian kredit mikro telah dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan perempuan (Hunt et al., 2001; Rajivan, 2001). Sementara itu peringatan hari perempuan sedunia tanggal 8 Maret 2005 lalu, telah pula ditandai dengan penekanan pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kalangan perempuan, salah satunya dengan memperluas akses terhadap kredit mikro bagi para perempuan tersebut.

Uraian di atas dan keberhasilan Grammen Bank semakin memperkuat argumen bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga mereka. Permasalahannya kemudian adalah apakah para perempuan yang menjadi kelompok sasaran atau penerima kredit mikro itu benar-benar diuntungkan atau dalam hal ini diberdayakan atau sebaliknya dengan menjadi penerima kredit mikro maka para perempuan dengan peran domestiknya justru semakin dibebani sehingga memperkuat *triple burden of women*, dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

Tulisan ini menjadi semakin penting mengingat data dari Badan Pusat Statistik dalam Indikator Sosial Perempuan Indonesia 1997, menunjukkan bahwa terdapat 63,54% penduduk perempuan yang bekerja dalam pekerjaan utama di desa, sementara untuk laki-laki sebesar 61,43%. Selain itu data BPS (2001) juga menunjukkan bahwa perempuan memegang 44,29% kepemilikan usaha mikro di Indonesia (usaha kecil hanya 10,28%). Walaupun jumlah ini lebih kecil dibanding kepemilikan laki-laki atas usaha mikro (yaitu 52,21%), diyakini secara riil, persentase ini jauh lebih besar karena data

BPS tersebut didasarkan pada kepemilikan usaha secara formal dan bukan pelaku riil di lapangan.

Selain itu fokus pada dampak kredit mikro untuk para perempuan, ini juga signifikan, mengingat studi tentang penyelenggaraan program kredit mikro yang efektif atau studi tentang efektivitas program ini bagi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan (seperti tulisan Rosintan Panjaitan, 1999; Joy Remenyi & Benjamin Quiñones, 2000). Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana dampak kredit mikro untuk perempuan penerimanya, khususnya apakah dampak tersebut mengarah pada pemberdayaan atau sebaliknya pembebanan bagi para perempuan penerimanya yang hingga saat ini masih bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas domestik sehingga semakin memperkuat *triple burden of women*, yaitu dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan sekaligus fungsi sosial di masyarakat.

Secara umum, artikel ini bermanfaat bagi pemecahan masalah pembangunan, sedangkan secara khusus dapat diketahui apakah kredit mikro bagi para perempuan lebih banyak berdampak positif, yaitu memberdayakan atau sebaliknya cenderung membebani para perempuan target *group*-nya. Selain itu tulisan ini dapat menjadi titik tolak untuk suatu studi/penelitian yang komprehensif tentang dampak kredit mikro terhadap perempuan penerimanya, untuk selanjutnya dapat memberikan informasi kepada perumus kebijakan di bidang keuangan mikro untuk mencari upaya yang lebih efektif dan efisien berkenaan dengan feasibilitas kredit mikro untuk perempuan, diantaranya pilihan kebijakan tentang apakah pengadopsian Grameen Bank di Indonesia adalah pilihan terbaik.

Pembangunan Berbasis Manusia

Pembangunan berbasis manusia (*people centered development*) melalui pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom-up*), telah menjadi strategi pembangunan favorit dewasa ini. Diantara inisiatif pembangunan dari bawah (masyarakat) ini, program-program kredit mikro dipandang sebagai suatu strategi anti kemiskinan yang menjanjikan. Hal ini karena program ini memungkinkan masyarakat miskin yang mejadi *target group*-nya memiliki masa depan yang lebih cerah dengan kemandirian yang menjadi tujuan akhir program tersebut. Tidak heran jika program kredit mikro dianggap sebagai kunci dalam mengatasi kemiskinan kronis, khususnya dalam memberdayakan penduduk miskin di berbagai penjuru dunia (Woller et al., 2001).

Mengapa kredit mikro? Menurut *Micro-credit Summit* 1997, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga yang paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya (Woller et al., 2001:265). Beberapa kecenderungan dalam program kredit mikro saat ini adalah: 1) lebih banyak ditujukan untuk perempuan, 2) kredit disalurkan pada individu sebagai anggota suatu kelompok, 3) pembayaran kembali bergantung pada ketepatan dan kedisiplinan kelompok (Kabeer, 2001:63). Program mikro kredit seringkali dipandang sebagai obat dari masalah kemiskinan. Program ini tidak hanya dijadikan instrumen agar kelompok miskin mempunyai akses pada lembaga keuangan formal, tapi lebih lanjut telah menjadi suatu gerakan untuk memberdayakan

masyarakat miskin, khususnya perempuan, yaitu dalam menanggulangi kemiskinan mereka, memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kelompok sasaran untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial (Rajivan, 2001).

Seperti telah diketahui, investasi dalam bentuk keuangan atau modal adalah sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Faktor inilah yang khususnya menjadi penghalang bagi kaum miskin yang punya sedikit atau bahkan tidak punya akses sama sekali terhadap keuangan dan modal. Sementara itu kredit seringkali adalah mata rantai yang hilang bagi keluarga miskin yang mencoba mempertahankan hidupnya dengan menjalankan usaha mikro atau kecil. Karenanya susah keluar dari perangkap kemiskinan (Panjaitan et al., 1999, Remenyi, 2000). Untuk mengatasi permasalahan diatas maka program kredit mikro diperlukan, yaitu untuk menyediakan modal baik ditujukan untuk memulai atau melanjutkan suatu usaha mikro atau kecil sebagai usaha peningkatan pendapatan (*income generating*). Namun kenyataan yang ada selama ini adalah bahwa usaha berskala besar mempunyai akses yang lebih (atau sangat) mudah terhadap kredit perbankan, sementara usaha mikro, terutama yang dijalankan rumah tangga miskin sering harus bangkrut atau bahkan tidak dapat dimulai karena kurangnya akses terhadap kredit.

Mengapa kredit mikro ditujukan untuk perempuan? Pendekatan anti kemiskinan dalam kerangka perempuan dalam pembangunan menempatkan perempuan sebagai kelompok *the poorest of the poor* (Moser, 1992; Remenyi, 2000). Beberapa pendapat bahkan mengatakan rumah tangga yang dikepalai perempuan sering menjadi kelompok *the poorest of*

the poor. Rose (1992), akses terhadap sumber daya dapat membebaskan perempuan dari kemiskinan. Asumsi inilah yang membuat lebih banyak perhatian diberikan pada kebutuhan perempuan. Tidak heran, perempuan telah menjadi kelompok sasaran utama dari kredit mikro (Remenyi, 2000). Namun, Jackson (1996) mengatakan pendekatan anti kemiskinan di atas, cenderung telah menekankan pada apa yang disebut sebagai *feminization of poverty* (memperempuankan kemiskinan), yaitu pendeskripsian yang tidak proporsional tentang perempuan sebagai kelompok miskin, karena kenyataannya beberapa studi menemukan bahwa rumah tangga yang dikepalai seorang perempuan tidak selalu berasosiasi dengan kemiskinan (Lloyd & Gage-Brandon, 1996 dan Agarwal, 1986 dalam Jackson 1996).

Argumen yang lebih rasional tentang mengapa kredit mikro lebih baik ditujukan pada perempuan, dapat digali dari strategi bertahan hidup perempuan, di sektor informal, yang juga berkaitan dengan karakteristik umum perempuan yang selama ini dikenal. Menurut Rose (1992), karakteristik perempuan dibandingkan dengan pria adalah mereka lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita. Hal ini karena perempuan mempunyai cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Disamping kemampuan mengolah sedemikian rupa penghasilan keluarga mereka, para perempuan juga terbukti sangat fleksibel dalam mengkombinasikan pekerjaan domestik mereka dengan aktivitas yang ditujukan memperoleh pendapatan. Intinya, perempuan mempunyai kontribusi memodernisasikan ide dan ketrampilan jika diberi kesempatan.

Lebih penting lagi, terdapat argumen bahwa perempuan jauh lebih rajin dan

teliti dalam memperhatikan jadwal pengembalian kredit mereka dibandingkan para pria, akibatnya mereka lebih disiplin dalam mengembalikan pinjaman (Remenyi, 2000:53). Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa dalam suatu program kredit mikro yang sama, perempuan mempunyai tendensi lebih baik dibanding pria dalam hal pengembalian pinjaman serta dalam hal dampak jangka panjang program terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian untuk program-program mikro kredit bertargetkan perempuan selama ini rata-rata mencapai diatas 90%. Sebagai contoh, menurut statistik PBB tentang perempuan dunia (1995), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro untuk perempuan, di Indonesia mencapai sebesar 91%, sementara program lain yang ber-*target group* pria persentasenya hanya 80% (Panjaitan et al., 1999:771-774; Robinson, 1997). Tingkat pengembalian sebesar 90% ini juga terjadi di India Tingginya tingkat pengembalian ini telah membuat para pembuat keputusan termasuk para agen donor percaya bahwa berbank dengan perempuan adalah *a financially sustainable operation* atau kegiatan keuangan yang berkesinambungan (Rajivan, 2001).

Selain alasan di atas, ada beberapa argumen penting mengapa meminjamkan kredit mikro pada perempuan lebih *feasible* atau efektif. Argumen pertama adalah perempuan lebih mungkin untuk menggunakan pinjamannya bersama dengan suami atau anggota keluarga lelaki mereka yang lain, dibanding sebaliknya lelaki peminjam dengan istri atau anggota keluarga perempuan yang lain. Selanjutnya, disamping perempuan diuntungkan secara personal dan sosial, kredit mikro untuk

perempuan juga diyakini memberikan manfaat yang lebih bagi keseluruhan keluarga dibanding kredit mikro untuk pria. Selain itu, perempuan mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hampir keseluruhan pendapatannya untuk keluarga, seberapa kecil pendapatan tersebut dan lebih memperhatikan masa depan anak-anak mereka dan siap untuk berkorban apa saja untuk mewujudkan masa depan tersebut (Kabeer, 2001; Khandker, 1998).

Alasan terpenting lain adalah pinjaman kepada pria cenderung meneruskan bahkan memperparah ketidakadilan gender dalam rumah tangga, yang berarti pula memperkuat posisi para pria dengan memberi mereka sumber daya dengan mana mereka mampu mencegah keikutsertaan para istri mereka untuk terlibat dalam aktivitas perolehan pendapatan mereka (Kabeer, 2001:83). Dalam kenyataan, struktur sosial masyarakat di banyak negara berkembang (seperti Bangladesh, dan beberapa daerah di Indonesia) cenderung tidak menguntungkan atau bahkan merendahkan kaum perempuan, meski bagi para perempuan dikalangan berada. Dibanding dengan para pria di kelompok yang sama, para perempuan seringkali kurang dapat menyadari dan menggali potensi-potensi kewirausahaan mereka. Hal ini disebabkan gender mereka telah menjadi penghambat untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan. (Kabeer, 2001; Mahmud, 2003). Di sinilah kredit mikro untuk perempuan berperan untuk mengarahkan sumber daya keuangan kepada para perempuan. Dengan pengelolaan kredit mikro yang lebih efisien dan efektif, program kredit mikro ini juga dapat menjadi dasar bagi para perempuan untuk menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan mereka, karenanya

secara berkelanjutan mengarah pada pemberdayaan perempuan (*sustainable pathways to women's empowerment*).

Kredit mikro memberdayakan perempuan? Evaluasi terhadap program kredit mikro dan dampaknya bagi para perempuan, khususnya apakah program ini mempunyai kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan menjadi penting demi keberlanjutan program ini secara finansial (*to make programs financially sustainable*) serta demi tercapainya efektivitas program (Mahmud, 2003).

Seperti telah diuraikan diatas, terdapat anggapan bahwa program kredit mikro secara otomatis berarti pemberdayaan. Anggapan ini begitu terinternalisasi sehingga para pembuat kebijakan termasuk lembaga-lembaga non pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melihat kredit mikro sebagai obat/penyembuh dari segala penyakit/masalah (*the panacea of all ills*) (Rajivan, 2001; Hunt et al., 2001). Sebagai contoh, tulisan tentang Grammen Bank (bank desa di Banglades) menemukan bahwa desa-desa di sekitar grammen bank, tingkat kemiskinan absolutnya 75% lebih rendah dibanding desa-desa yang tidak menjadi target *grammen bank* (Bhatt, 2001).

Mayoux (1999) juga berpendapat bahwa akses terhadap kredit mikro untuk perempuan mempunyai efek penting terhadap proses pemberdayaan perempuan. Dalam pendapatnya kredit mikro mengimplikasikan tiga hal, yaitu keberlanjutan keuangan yang mandiri, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan para feminis. Di sini Mayoux menekankan pula bahwa program kredit mikro untuk perempuan mengarah pada pemberdayaan ekonomi para perempuan tersebut yang hal ini akan lebih jauh mengarah pada pemberdayaan sosial, politik dan legal

dan pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan *social capital* atau modal sosial yaitu dengan melalui berkembangnya jaringan antar mereka (Mahmud, 2003).

Namun, dari review literatur tentang pemberdayaan perempuan diketahui bahwa masih sedikit tulisan dasar di masyarakat (*primary research at the grassroots level*) untuk memahami tentang apa sebenarnya arti pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari para perempuan. Selain itu ada banyak definisi, sekaligus berbagai macam dimensi pemberdayaan yang mengarah pada indikator yang berbeda, serta interpretasi dan hasil evaluasi yang berbeda pula (Kabeer, 2001; Mahmud, 2003).

Adakah konsep pemberdayaan, dimensi dan indikator yang digunakan? Menurut Kabeer (1999:2), konsep pemberdayaan merujuk pada *power as determining choice and ability to choose*, yaitu kekuasaan untuk menentukan pilihan dan kemampuan untuk memilih. Lebih jelasnya, konsep ini berarti proses dengan mana mereka yang tidak berkemampuan untuk memilih menjadi berkemampuan untuk itu. Konsep pemberdayaan dalam aktivitas pembangunan telah sejak lama ditekankan pada kesejahteraan perempuan (Sen, 2000 dalam Mahmud, 2003). Menariknya, telah ada pergeseran penekanan terhadap konsep pemberdayaan bagi para perempuan, yaitu dari penerimaan pasif: pemberdayaan para perempuan dalam kaitannya dengan kecenderungan superioritas pria (*the relative well being of women vis-à-vis men: passive acceptance*), ke arah penekanan pentingnya peranan agen-agen pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan semua keluarga, khususnya perempuan (*more active acceptance and participation*). Dalam hal kredit mikro untuk perempuan,

konsep pemberdayaan harus mengarah pada konsep pemberdayaan pasif dan aktif mengingat perempuan sering harus berhadapan dengan ketidakadilan kaum pria.

Definisi pemberdayaan yang sesuai dengan kerangka kerja kredit mikro dikaitkan dengan upaya pemberdayaan dijelaskan Mayoux' (1998). Menurut Mayoux, dalam konteks ini pemberdayaan adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan proses dimana orang yang tidak berdaya menjadi sadar akan situasi mereka sendiri kemudian mengorganisasikan diri mereka secara kolektif, ditujukan untuk memperoleh akses yang lebih terhadap pelayanan publik serta untuk pengembangan tingkat ekonomi mereka (Rajivan, 2001).

Dari berbagai kerangka kerja dan indikator pemberdayaan yang relevan untuk program kredit mikro, untuk menjelaskan dampak kredit mikro bagi pemberdayaan perempuan, artikel ini mengelaborasi kerangka pemikiran Rajivan (2001) dan Mahmud (2003), dengan pertimbangan terdapat keterkaitan dalam kerangka pemikiran mereka serta lebih praktis. Sementara itu, dalam penelitiannya tentang dampak kredit mikro dan pemberdayaan perempuan di Banglades, menurut Rajivan (2001), terdapat delapan dimensi pemberdayaan, yaitu: 1) akses dan kontrol terhadap aset dan sumberdaya perorangan, 2) Akses terhadap sumber daya publik, 3) kontrol terhadap tenaga kerja dan pendapatan, 4) kontrol terhadap tubuh mereka sendiri (keamanan dan kenyamanan sex, reproduksi dan fisik), 5) kontrol terhadap mobilitas fisik, 6) akses dan kontrol terhadap ruang politik, 7) akses dan kontrol terhadap sumber daya yang bersifat *intangible* (informasi, pengaruh-pengaruh politik), 8)

posisi yang sama dan akses dalam struktur hukum.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, maka artikel ini hanya akan memfokuskan pada dampak kredit mikro terhadap proses pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan aspek internal keluarga. Karena itu dimensi/variabel dan indikator yang digunakan dalam tulisan ini meliputi: pertama, akses/kontrol perempuan terhadap aset dan sumber daya perorangan (material maupun non-material), termasuk tenaga kerja dan pendapatan (dimensi pertama dan ketiga dari kerangka pemikiran Rajivan), diukur dengan 1) kepemilikan aset individual, yaitu tingkat kesejahteraan/pendapatan keluarga, 2) keikutsertaan dalam pengambilan keputusan akan aset individual tersebut, dalam hal ini pendapatan keluarga dan akses istri/perempuan terhadap pendapatan suami/pria, 3) pembagian kerja (*division of labour*) istri dan suami, yaitu dimana secara tradisional istri bertanggung jawab pada aktivitas domestik, seperti membesarkan anak, membersihkan rumah, memasak dan pekerjaan rumah tangga yang lain; sedangkan suami bertanggung jawab pada aktivitas produktif berkenaan dengan perolehan pendapatan. Artikel ini juga ingin mengetahui apakah pembagian kerja ini tetap berlaku ataukah telah ada kerjasama antara pekerjaan domestik dan produktif keluarga antara suami dan istri, keamanan pangan/tingkat konsumsi baik secara kuantitas dan kualitas, tingkat pendidikan anak, khususnya anak perempuan.

Kedua, akses terhadap sumber daya publik, dalam hal ini akses dan kontrol terhadap pendapatan yang berasal dari pinjaman kredit mikro dan pemanfaatannya, yaitu apakah perempuan mengambil

kontrol dalam penggunaan kredit yang diperolehnya, mengelola sendiri usaha kecil mereka termasuk pemasaran produk mereka dan mengontrol uang hasil usaha mikro tersebut.

Ketiga, kontrol perempuan terhadap tubuh mereka diukur dengan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal yang penting dalam perkawinan mereka, seperti dalam: 1) keputusan mengenai anak (termasuk jumlah, jarak, atau bahkan penentuan jenis kelamin, dan cara membesarkannya), 2) penggunaan kontrasepsi dan aborsi, 3) berhubungan seksual dengan suami, 4) kecenderungan untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Gender, Perempuan dan Kredit Mikro di Indonesia

Pada hari Sabtu, 26 Februari 2005, seiring dengan pencanangan tahun 2005 sebagai *the year of microfinance* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, telah mencanangkan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden juga sekaligus mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Indonesia. Untuk mendorong keberhasilan program ini Presiden telah meminta perbankan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit serta meningkatkan persentase kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM. Pencanaan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah atas peran UMKM, yang jumlahnya telah mencapai 42 juta atau 99,85% dari total usaha yang ada di Indonesia. Dengan pencanangan ini Presiden berharap angka kemiskinan dan

pengangguran dapat ditekan. Saat ini angka pengangguran mencapai 9-10% dari total penduduk Indonesia. Presiden berharap angka ini turun menjadi 5-6% selama lima tahun kepengimpinannya mendatang. Sebagaimana juga tujuan menurunkan tingkat kemiskinan yang sampai tahun 2004 jumlah penduduk miskin mencapai 36,1 juta orang atau 16,6% dari total penduduk Indonesia.

Sayangnya, pencanangan tahun keuangan mikro 2005 disertai dengan munculnya berbagai produk perbankan untuk melayani pelaku UMKM akhir-akhir ini terkesan netral gender. Kenyataan ini berimplikasi pada strategi penyusunan program dan institusi keuangan mikro sebagai mediumnya. Hal ini terlihat misalnya dari program Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam aspek nonfinansial maupun finansial yang tak menyinggung persoalan gender.

Cara pandang yang netral atau buta jender ini merujuk pada kenyataan dimana situasi perempuan pengusaha mikro dan laki-laki dilihat tanpa melihat adanya persoalan krusial yang khas pada masing-masingnya. Padahal, perempuan pengusaha mikro juga mempunyai persoalan berbeda dari yang dialami laki-laki pengusaha mikro. Bahkan perempuan yang bekerja di sektor usaha mikro menghadapi problematika lebih berat dibanding kaum laki-laki, dimana mereka menghadapi dua hal sekaligus, yaitu problem teknis usaha dan problem struktural. Dalam problem teknis usaha perempuan pengusaha mikro mengalami hambatan yang sama sebagaimana pelaku usaha mikro umumnya, seperti kekurangan modal, keterbatasan penguasaan teknologi tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, terbatasnya keterampilan manajemen

dan penguasaan ketrampilan teknis produksi.

Sedangkan, dalam problem struktural, perempuan tertimpa dua hal sekaligus. Pertama, beragam kebijakan pemerintah berupa peraturan yang tidak adil dan sertifikasi kelayakan produk baik di pusat maupun daerah, dan peraturan kelembagaan seperti perbankan yang memberi layanan kredit, serta ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan perdagangan. Kedua, hambatan struktural yang berkaitan dengan tubuh perempuan, yaitu perempuan merasa kesulitan dalam pengembangan usaha akibat ketimpangan relasi antara perempuan dengan keluarga dan suami di ranah domestik dan di masyarakat.

Dengan perbedaan di atas, membantu perempuan pengusaha mikro memerlukan pendekatan berbeda dengan pengusaha laki-laki. Intervensi pemerintah berupa program ataupun pendanaan lewat lembaga keuangan mikro yang sensitif terhadap persoalan dan kebutuhan perempuan mutlak menjadi arus utama. Karena dalam kredit mikro sendiri sebenarnya tersimpan fungsi pemberdayaan bagi golongan tertinggal, maka perempuan pengusaha mikro yang selama ini terpinggirkan dalam banyak sisi patut mendapat porsi utama dengan program yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan.

Sayangnya, artikel ini menemukan bahwa kenetralan gender dalam pencairan tahun keuangan mikro ini diikuti oleh lembaga keuangan penyedia kredit mikro (khususnya perbankan) untuk tidak memperhatikan aspek gender dalam produk kredit mikro mereka. Badan Perkreditan Rakyat dan Bank Rakyat Indonesia, misalnya, tidak mempunyai *scheme* kredit mikro yang khusus dialokasikan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Jadi mereka hanya mengalokasikan kredit

sesuai dengan surat pengajuan kredit dengan tidak memperhatikan apakah yang mengajukan laki-laki atau perempuan.

Yang menggembirakan adalah telah ada upaya pemerintah untuk memformulasi dan mengimplementasikan beberapa mekanisme atau program kredit mikro yang khusus untuk ditargetkan untuk para perempuan diantaranya adalah: Program Kredit Keluarga Sejahtera (KUKESRA), Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), Program Kredit Mikro untuk Penguatan Perempuan Pengusaha Kecil dan Mikro yang dikoordinasikan oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Pengusaha Kecil (ASSPUK) dan Pengembangan Ekonomi Perempuan Usaha Kecil (PPEUK) dan banyak lagi. Dengan diformulasikan dan diimplementasikannya program kredit mikro bertargetkan perempuan beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan, khususnya para pelaku kredit mikro dapat terselesaikan, namun begitu, program seperti ini tidak jarang menimbulkan permasalahan baru yaitu semakin membebani para perempuan yang selama ini telah mengalami *triple burden of women*, dimana perempuan melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat.

Dampak Mikrokredit bagi Perempuan Penerima

Banyak yang mengasumsikan akses terhadap kredit bagi para perempuan, dengan sendirinya akan meningkatkan status mereka dalam rumah tangga maupun masyarakat, dan karenanya mengarah kepada pemberdayaan perempuan (Hunt et al., 2001). Namun, terdapat kenyataan bahwa selain memberdayakan perempuan yang menjadi *target group*-nya, program

kredit mikro dapat pula membebani perempuan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan di bawah ini. Penjelasan akan disesuaikan dengan uraian tentang dimensi pemberdayaan pada tinjauan pustaka. Pemberdayaan dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya personal termasuk pendapatan dan tenaga kerja dapat berhubungan dengan dampak kredit mikro terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan pembagian kerja dalam rumah tangga.

Apakah kredit mikro berdampak pada penghasilan dan kesejahteraan keluarga? Rumah tangga yang memperoleh pinjaman dari kredit mikro, relatif lebih baik dalam hal kesejahteraan dibanding rumah tangga yang tidak mendapat pinjaman kredit mikro. Selain meningkatkan pendapatan keluarga, kredit mikro juga memberi inspirasi/ membantu penerimanya untuk menciptakan suatu usaha produktif baik untuk diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka. Selain itu, kredit memungkinkan penerimanya untuk mempunyai standar konsumsi yang lebih tinggi. Sementara itu, banyak argumen yang menyatakan bahwa meningkatnya akses perempuan dalam memperoleh pendapatan juga akan meningkatkan kemampuan mereka untuk turut serta dalam pengambilan keputusan di keluarga. Dengan pinjaman dari kredit mikro, para perempuan mempunyai kesempatan untuk bersama-sama dengan suami mereka mengambil keputusan untuk hal-hal yang penting dalam keluarga seperti pengalokasian keuangan rumah tangga, pendidikan anak-anak mereka, keluarga berencana (KB), dan lebih lanjut partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

Dalam hal pendidikan, terdapat kecenderungan bahwa anak-anak

perempuan dari keluarga yang memperoleh pinjaman dari kredit mikro, mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah dibanding anak-anak perempuan dari keluarga yang tidak mendapat kredit mikro. Hal ini dikarenakan adanya tambahan penghasilan yang dapat mereka gunakan untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Namun, perlu dipertimbangkan pula kemungkinan adanya anak gadis yang harus berhenti bersekolah untuk membantu pekerjaan ibunya yang semakin bertambah setelah menerima kredit. Kemungkinan ini bisa saja terjadi, mengingat beban ganda yang harus disandang perempuan untuk ranah domestik dan produktif.

Apakah kredit mikro berdampak terhadap pembagian kerja? Di dalam masyarakat, terdapat kecenderungan pembagian kerja dalam rumah tangga yang terus melanggengkan domestifikasi pekerjaan bagi para perempuan. Yaitu pembagian kerja berbasis gender dalam keluarga, dimana pria mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan produktif (pekerjaan berkaitan dengan perolehan pendapatan keluarga), sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan domestik (seperti merawat anak, membersihkan rumah, memasak, dan pekerjaan rumah yang lain Terlepas dari keberlanjutan pembagian pekerjaan tersebut di atas, perempuan yang aktif mengembangkan usaha produktif yang menghasilkan pendapatan bagi keluarga, lebih besar kemungkinan suami-suami mereka menjadi lebih mau bekerjasama dalam tugas-tugas rumah tangga. Karena itu mereka mempunyai lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pendapatan. Dari uraian ini, poin penting adalah kredit mikro berpengaruh terhadap pembagian kerja,

namun pengaruh ini kurang signifikan tanpa adanya pemahaman akan gender dan kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Pemberdayaan akses perempuan terhadap sumber daya publik dapat berhubungan dengan dampak kredit mikro terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan pinjaman. Kontribusi kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan dapat diidentifikasi dari pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan kredit, seperti siapa yang mengontrol penggunaan kredit, siapa yang mengelola usaha yang didukung oleh kredit, siapa yang mengontrol pemasaran produk, dan siapa yang mengontrol penghasilan yang didapat dari usaha yang didukung kredit mikro.

Sesuai pendapat Ackerly (1995), jika para perempuan yang menjadi informan menjawab merekalah yang mengontrol untuk semua pertanyaan tersebut maka mereka dikatakan telah berdaya. Kontrol perempuan terhadap kredit dan usaha mikro yang mereka punya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan para perempuan dan suaminya, termasuk juga struktur sosial ekonomi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam banyak struktur sosial masyarakat berlaku sistem patriarki dimana otoritas melekat dalam diri ayah atau anggota keluarga laki-laki lain yang ada dalam keluarga. (Pearson, 1992). Norma ini mewajibkan perempuan untuk meminta izin kepada suami atau anggota keluarga laki-laki yang lebih tua untuk melakukan banyak hal, termasuk partisipasi aktif dalam kredit mikro termasuk untuk menerima pinjaman. Hal, ini kemudian mempengaruhi kontrol terhadap kredit yang diterima. Tidak jarang suami hanya akan mengizinkan istrinya untuk aktif dalam program kredit mikro jika istri-

istri mereka menjanjikan akan memberi sebagian dari kredit yang mereka terima kepada suami mereka. Karena itu tidak mengherankan jika terkadang kredit mikro yang seharusnya bertargetkan atau diterimakan kepada perempuan, kenyataannya ketika pencairan yang menerima adalah suami mereka. Ketika ditanya kenapa bukan istrinya yang mencairkan dana sang suami dengan enteng menjawab bahwa istrinya ada di rumah untuk menjaga anak dan melakukan tugas rumah tangga yang lain.

Terlepas dari pentingnya kerjasama antara suami dan istri, perlu ditekankan bahwa kredit mikro untuk para perempuan ditujukan agar perempuan yang selama ini cenderung pasif dan termarginalisasikan menjadi lebih berdaya. Karena itu prioritas dan upaya tetap harus ditujukan kepada hasil akhir agar perempuan lebih berdaya dan tidak hanya tergantung kepada para suami atau saudara laki-laki mereka melainkan mampu menentukan apa yang terbaik untuk dirinya.

Pemberdayaan dapat pula dilihat dari kontrol perempuan terhadap tubuh mereka yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Ada korelasi antara program kredit mikro dengan berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan. dikarenakan kontribusi istri secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dari kredit yang mereka terima. Namun ditemukan pula kenyataan dimana keterlambatan atau kegagalan seorang istri untuk memperoleh kredit berakibat pada frustrasi suami dan kemudian mengarah ke meningkatnya tindak kekerasan kepada istri. Dalam kasus seperti ini, tulisan ini menemukan bahwa program kredit mikro yang mendistribusikan uang dengan basis kelompok, telah berkontribusi terhadap

menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Program kredit mikro merupakan pemberdayaan atau pembebanan? Apakah kredit mikro mengarah pada pemberdayaan perempuan dan karenanya membantu mereka melepaskan diri dari kemiskinan atau sebaliknya kredit mikro justru membuat segala ketidakadilan gender semakin menjadi dan karenanya membebani para perempuan. Pinjaman untuk perempuan melalui program kredit mikro dapat memberdayakan para perempuan penerimanya, khususnya dalam hal meningkatnya akses mereka terhadap kerja yang berorientasi pasar. Dan memang program kredit mikro yang salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan partisipasi tenaga kerja perempuan, tanpa diiringi dengan akses terhadap pasar di kalangan perempuan akan berakibat pada kelelahan dan beban yang berlebihan bagi para perempuan. Intinya perempuan yang mempunyai waktu lebih banyak untuk aktif dalam kegiatan produktif (aktivitas berkaitan dengan pendapatan keluarga) dapat diinterpretasikan bahwa perempuan tersebut mempunyai akses terhadap pasar.

Dampak pinjaman melalui kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan dapat dilihat pula pada tingkat konsumsi rumah tangga yang lebih baik. Tingkat konsumsi yang lebih tinggi ini menunjukkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada pemberdayaan. Akan tetapi, tingkat konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan tingkat konsumsi keluarga dapat diinterpretasikan secara berlawanan sehingga mengarah pada anggapan bahwa program kredit mikro semakin membebani para perempuan. Kenyataan

ini menunjukkan bahwa kredit mikro untuk perempuan semakin melegitimasi beban ganda perempuan dimana selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, perempuan mempunyai beban untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang seharusnya adalah tanggung jawab kepala keluarga (suami mereka). Karenanya, beban ini akan semakin memperkuat *triple burden of women*, dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan sosial di masyarakat.

Sementara itu proyek yang bertujuan untuk menggulirkan pinjaman dan nantinya pendapatan seperti kredit mikro ini memfokuskan diri hanya pada satu aspek yaitu problem perempuan untuk mengakses keuangan dan pendapatan keluarga, namun program-program seperti ini lupa untuk mempertimbangkan bagaimana waktu para perempuan telah sedemikian terbatas untuk aktivitas domestik. Sebagaimana pendapat Pearson (1992), bahwa dalam suatu rumah tangga yang sama, beban kerja perempuan miskin di negara dunia ketiga melebihi beban kerja para pria.

Karena itu untuk mengatasi hal ini sosialisasi tentang kesetaraan gender menjadi kunci penting bagi keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan melalui program mikro kredit. Dengan sosialisasi gender seperti ini maka segala pekerjaan/aktivitas rumah tangga baik yang berhubungan dengan aktivitas domestik maupun aktivitas produktif tidak terdiktomi secara ekstrim (perempuan berhubungan dengan aktivitas domestik, sedangkan pria berhubungan dengan aktivitas produktif) namun dilakukan secara bersama oleh suami dan istri, walaupun harus ada pembagian, maka pembagian disepakati bersama oleh suami istri dan mungkin suatu kerjasama.

Sementara itu, dominasi atau kontrol suami terhadap pinjaman yang berasal dari kredit mikro menunjukkan bahwa kecil sekali manfaat kredit mikro bagi para perempuan disebabkan adanya relasi gender dalam keluarga di mana perempuan kehilangan kontrol atas pinjaman yang didapatnya dari kredit mikro. Hal ini telah membuat perempuan tidak jarang terjebak dalam kredit macet sebagai konsekuensi atas relasi gender. Dengan kata lain, kredit mikro bisa membuat para perempuan rawan dalam hal keuangan (sebagai contoh jika usahanya bangkrut), yaitu dapat membuat mereka terjebak dalam kredit macet sehingga sulit bagi mereka untuk lepas dari kemiskinan. Kerawanan ini akan semakin menjadi kenyataan terutama jika mereka memanfaatkan kredit yang seharusnya untuk kegiatan produktif menjadi hal yang bersifat konsumtif. Tidak heran, terdapat anggapan bahwa mikro kredit tidak jarang menjadi tangga pertama kepada hutang dan kebangkrutan usaha.

Untuk hal ini yang perlu dilakukan tentunya adalah kegiatan *follow up* atau lanjutan dari sekedar mendistribusikan pinjaman melalui kredit mikro. Kegiatan lanjutan ini bisa berupa pendidikan dan ketrampilan seperti pelatihan manajemen dan penguasaan keterampilan teknis produksi dan teknis usaha, upaya-upaya untuk meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna dan memperluas jaringan pasar dan lain sejenisnya. Semua ini akan memberi bekal pengetahuan (disamping dukungan finansial yang telah diterima melalui kredit mikro) bagi para perempuan pelaku usaha mikro untuk lebih mengembangkan usahanya.

Dari semua penjelasan di atas, yang terpenting untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah dengan mengadopsi pengertian pemberdayaan (*empowerment*)

sebagai ekspansi dari serangkaian pilihan yang ada untuk perempuan (*expansion in the range of potential choices available to women*) (Kaber, 2001:81). Dengan mengadopsi definisi ini, jawaban untuk pertanyaan tentang apakah kredit mikro memberdayakan atau sebaliknya justru membebani perempuan akan tergantung sepenuhnya pada pilihan perempuan sebagai individu. Sebagai contoh, perempuan yang secara sadar dan sengaja memilih untuk mentransfer kredit mikro yang ia terima kepada suami mereka untuk mengelola dan mengontrol pinjaman tersebut dapat dilihat sebagai berdaya karena inilah yang menjadi pilihannya.

Kredit Mikro: Hambatan dan Peluang

Ada anggapan bahwa memberi pinjaman kepada masyarakat miskin pada dasarnya beresiko. Kepercayaan ini diperparah dengan fakta bahwa program kredit mikro sering berhadapan dengan besarnya biaya operasional dan rendahnya tingkat pengembalian. Meski begitu, tingkat pengembalian yang tercatat cukup tinggi, khususnya untuk program kredit mikro yang bertargetkan perempuan sepertinya telah menguatkan fakta bahwa memberi pinjaman kepada perempuan yang miskin adalah memungkinkan. Namun, perlu diingat bahwa program kredit mikro yang kebanyakan diadopsi secara internasional sebagai obat yang mujarab (*panacea*) bagi kemiskinan tidak dan tidak dapat sampai pada yang termiskin dari yang miskin (*the poorest of the poor*). Realitanya, perempuan termiskin seringkali mengeluarkan diri mereka sendiri dengan menghindari sebagai kelompok sasaran dengan alasan ketakutan untuk tidak bisa membayar atau ketakutan akan kebangkrutan jika

berusaha. Mereka yang termiskin juga tidak jarang sengaja tidak dilibatkan oleh anggota kelompok mereka yang lain atau oleh aparat pelaksana program dengan alasan ketidakmampuan mereka untuk membayar, disamping juga adanya target-target yang harus dipenuhi oleh aparat pelaksana, seperti dalam hal jumlah kelompok yang terbentuk, uang yang harus didistribusikan, termasuk tingkat pengembalian dan lain sejenisnya.

Sementara itu, kredit mikro telah menjadi suatu industri penawaran (*supply driven industry*) yang dimotori oleh agen-agen pendonor. Akibatnya, program ini cenderung untuk memfokuskan diri pada target-target yang telah ditetapkan, yang sayangnya terkadang mengacuhkan tujuan-tujuan sosial seperti pemberdayaan perempuan. Hal ini terlebih untuk lembaga keuangan mikro, dimana keberlanjutan lembaga sangat tergantung pada bergulirnya kredit (*financial self-sustainability*), sehingga lembaga keuangan seperti ini lebih banyak mentargetkan klien atau klien perempuan yang telah mempunyai usaha.

Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas kesimpulan dalam tulisan ini adalah: pertama, kredit mikro mungkin bukan satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengentaskan kelompok sasarannya dari kemiskinan, namun sebagai salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan, program kredit mikro telah berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga miskin yang jadi kelompok sasarannya termasuk yang terpenting adalah kontribusinya pada penumbuhan kemandirian (*self-reliance*) kelompok sasaran. Hal ini karena kredit mikro memberikan akses keuangan kepada

kelompok masyarakat miskin, sementara keterbatasan keuangan/modal inilah yang menjadi penyebab utama kenapa seseorang tetap miskin.

Kedua, program kredit mikro yang kebanyakan diadopsi secara internasional sebagai obat yang mujarab (*panacea*) bagi kemiskinan tidak dan tidak dapat sampai pada kelompok masyarakat termiskin dari yang miskin (*the poorest of the poor*). Realitanya, kelompok termiskin (termasuk perempuan termiskin) seringkali mengeluarkan diri mereka sendiri dengan menghindar sebagai kelompok sasaran dengan alasan ketakutan untuk tidak bisa membayar atau ketakutan akan kebangkrutan jika berusaha.

Ketiga, kredit mikro telah menjadi suatu industri penawaran (*supply driven industry*) yang dimotori oleh agen-agen pendonor. Akibatnya, program ini cenderung untuk memfokuskan diri pada target-target yang telah ditetapkan, yang sayangnya terkadang mengacuhkan tujuan-tujuan sosial seperti pemberdayaan perempuan.

Keempat, program kredit mikro sangat beragam baik, mekanisme, prosedur, besarnya dana dan lain sejenisnya. Selain itu program ini didesain, diimplementasikan dan dievaluasi secara berbeda. Dalam suatu proses evaluasi atau penelitian, misalnya banyak macam metodologi, kerangka berfikir/kerangka konseptual, dimensi dan indikator pemberdayaan, termasuk penginterpretasian data yang diperoleh. Semua ini mengarah pada kesimpulan yang berbeda-beda untuk suatu permasalahan seperti apakah kredit mikro untuk perempuan memberdayakan perempuan atau sebaliknya semakin membebani mereka. Kelima, untuk menjawab permasalahan tentang apakah kredit mikro memberdayakan atau semakin

membebani perempuan penerimanya, tulisan ini menyimpulkan bahwa program kredit mikro, berkontribusi baik kepada pemberdayaan maupun pembebanan perempuan.

Keenam, dampak kredit mikro terhadap pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya personal termasuk akses terhadap pendapatan dan tenaga kerja, dimana selain dapat meningkatkan pendapatan perempuan, kredit mikro juga memberi inspirasi/membantu penerimanya untuk menciptakan suatu usaha produktif baik untuk diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka, disamping juga memberdayakan para perempuan dalam hal meningkatnya akses mereka terhadap kerja yang berorientasi pasar.

Ketujuh, peran kredit mikro dalam pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari akses perempuan terhadap sumber daya publik, yaitu akses perempuan terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan pinjaman. Selain itu pemberdayaan dapat dilihat dari kontrol perempuan terhadap tubuh mereka, dimana kredit mikro berkontribusi terhadap penurunan tindak kekerasan kepada perempuan.

Kedelapan, kredit mikro juga dapat membebani para perempuan, karena kredit semacam ini semakin melegitimasi beban ganda perempuan dimana selain bertanggungjawab pada pekerjaan domestik, perempuan mempunyai beban untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang seharusnya adalah tanggung jawab kepala keluarga (yaitu suami mereka).

Dengan kata lain program seperti kredit mikro ini memfokuskan diri hanya pada satu aspek yaitu problem perempuan untuk mengakses keuangan dan pendapatan keluarga, namun program seperti ini lupa

untuk mempertimbangkan bagaimana waktu para perempuan telah sedemikian terbatas untuk aktivitas domestik, sehingga semakin memperkuat *triple burden of women*, yaitu bahwa perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan sosial di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bhatt, Nitin, & Shui-Yan Tang, "Delivering Microfinance in Developing Countries: Controversies and Policy Perspectives," *Policy Studies Journal*, 29 (2):121-129, 2001.
- Dewayanti, Ratih, & Erna Ermawati Chotim, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan* (Surabaya: Lemlit Unair, 2004).
- Hunt, Juliet & Nalini Kasyanathan, "Pathway to Empowerment? Reflection on Microfinance and Transformation in Gender Relations in South East Asia," *Gender and Development*, 9 (1): 42-52, 2001.
- Jackson, Cecile, "Rescuing Gender from the Poverty Trap," *World Development*, 26 (3), 1996:389-404.
- Kabeer, Naila, "Conflicts Over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh," *World Development*, 29(1): 63-84, 2001.
- Mahmud, Simeen, "Actually How Empowering in Micro Credit," *Development and Change*, 34(4): 577-605, 2003.
- Moser, Caroline, *Third World Policy Approaches to Women in Development* (London: Routledge, 1992).
- Panjaitan, Rosintan D. M., Drioadisuryo & Kathleen Cloud, "Gender, Self-Employment and a Micro Credit

- Program: An Indonesian Case Study,” *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 39 (5):94-105, 1999.
- Pearson, Ruth, *Gender Matters in Development* (New York: Oxford University Press, 1992).
- Rajivan, Anuradha, “Credit and Women’s Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd.)”, *United Nations Development Program (UNDP) DRAF*, (<http://www.undp.org.in/report/wkspscmblizn/casestudy/ofsm1.htm>). Diakses 1 Oktober 2003.
- Remenyi, “Is There a State of the Art in Microfinance,” dalam Remenyi (Ed.) *Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific* (London: Routledge, 2000).
- Robinson, Marguerite S, “Microfinance in Indonesia,” *UNESCO Courier*, 27-39, 1997.
- Rose, Kalima, *Where Women are Leaders: The SEWA Movement in India* (London: Zed, 1992).
- Woller, Garry M, & Warner Woodworth, “Micro Credit and Third World Development Policy,” *Policy Studies Journal*, 29 (2): 265-271, 2001.
- Young, Kate, *Planning Development with Women: Making a World Difference* (London: Macmillan, 1993).